

## ABSTRAK

Penelitian berjudul tanggung jawab pengemudi taksi *online* terhadap penggunaan akun milik orang lain, membahas permasalahan apakah pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain dapat bertanggungjawab dari segi hukum pidana dan bagaimana tanggung jawab pengemudi taksi *online* atas kejahatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan akun milik orang lain. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain dapat bertanggungjawab dari segi hukum pidana, karena pengemudi taksi *online* menjalankan operasi taksi secara *online*, namun tidak mempunyai akun atas namanya sendiri melainkan milik orang lain tanpa hak. Menggunakan akun untuk operasional taksi milik orang lain tanpa hak yang berarti telah menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan. Menggunakan akun atau dokumen elektronik palsu, maka kepadanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE. Pengemudi taksi *online* yang melakukan tindak pidana menggunakan akun milik orang lain yakni akun samaran atau menggunakan akun milik orang lain. Secara umum, pengertian fake account ini merujuk pada akun yang tidak menggunakan data dan identitas asli si pemilik akun. X selaku pengemudi taksi *online* yang terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE dan sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga terjadi perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana. Pelaku yang melakukan satu perbuatan namun melanggar dua peraturan perundang-undangan dalam hal ini melanggar Pasal 368 KUHP sebagai aturan yang bersifat umum, sekaligus melakukan perbuatan melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE sebagai aturan yang bersifat khusus. Berdasarkan atas asas *lex specialis derogat lex generalis*, bahwa aturan yang bersifat umum ditiadakan oleh aturan yang bersifat khusus sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka lebih tepat jika didakwa, dituntut dan diputus atas dasar telah melakukan tindak pidana melanggar aturan yang bersifat khusus.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, pengemudi taksi *online*, penggunaan akun milik orang lain

## ABSTRACT

*The study, titled online taxi driver's responsibility for the use of fake accounts, discusses the issue of whether online taxi drivers who use fake accounts can be held responsible in terms of criminal law and how the online taxi driver's responsibility for crime forces a person with violence or threat of violence using fake accounts. Research using the statutory approach and the concept approach is concluded as follows: Online taxi drivers who use fake accounts can be held responsible in terms of criminal law, because online taxi drivers run taxi operations online, but do not have accounts in their own names but belong to others without rights. Using an account for someone else's taxi operation without rights means using fake or falsified documents. Using fake electronic accounts or documents, it can be said that he has committed a crime in violation of the provisions of Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 of the ITE Law. Online taxi drivers who commit crimes using fake accounts namely fake accounts or fake accounts. In general, the notion of a fake account refers to an account that does not use the data and the original identity of the account owner. X as an online taxi driver who is proven to have committed a crime violating the provisions of Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 of the ITE Law and at the same time committing an act violating the provisions of Article 368 of the Criminal Code, so that there is a parallel act of crime as regulated in Chapter IV of the Criminal Code concerning Criminal Reform. Actors who commit one act violate two laws and regulations in this case violate Article 368 of the Criminal Code as a general rule, while at the same time violate Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 of the ITE Law as a specific regulation. Based on the principle of *lex specialist derogat lex generalis*, that general rules are obviated by special rules as Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code, it is more appropriate if charged, prosecuted and decided on the basis of having committed a crime in violation of special rules.*

*Keywords: Responsibility, online taxi drivers, fake account use*